

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- A. Qodri Azizy, *Menggagas Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
- Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Mmh Jilid 43, Jakarta, 2014.
- Andi Fahmi dan Ningrum, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Arifin, Firmansyah, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2005, dalam Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 202.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Bryan A Garnier, *Black's Law Dictionary, cet. 8*, St. Paul Minnesota, West Publishing.Co., 2004.
- Crince le Roy, *Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981.

- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha : Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Gede A. B. Wiranata, *Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction* dalam Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.
- Hikmahanto Juwana, et.al., *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Business Competition, Jakarta.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Tim Kompas, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007.
- KPPU, *Majalah Kompetisi Edisi 39: Bertarung Melawan Kartel*, KPPU, Jakarta, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Depok, 1998.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.
- Mukhtie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktinya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary Edisi Ketiga, Oxford: Oxford University Press. *Powers for Investigating Criminal Cartels*, hlm 320-323, dalam Richard Whish and David Bailey, *Competition Law (Seventh Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Richard Wish and David Bailey, *Competition Law (Seventh Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif/: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Membedah Huk Progresif*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- Shidarta, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi" dalam Moh. Mahfud MD, Sunaryati Hartono, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Malang, 2013.
- Sri- Edi Swasono, *Pancasila, Humanisme, Pasal 33 UUD 1945, Kooperativisme, Menolak Liberalisme*, Orasi Ilmiah, Universitas Pasundan, Bandung, 2011, dalam Aan Jaelani, *Pancasila, Globalisasi dan Pasar Bebas: Meneguhkan Kembali Ekonomi Pancasila sebagai Karakter Bangsa*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Declaration of Human Rights tahun 1948.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Perkara Kartel.

Putusan Pengadilan

Putusan KPPU tentang Perkara Kartel Nomor: 17/KPPU-I/2010.

Putusan KPPU tentang Perkara Kartel Nomor: 17/KPPU-I/2010.

Putusan KPPU tentang Perkara Kartel Nomor: 24/KPPU-I/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 006/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

A.M. Muhajidin, *Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Varia Peradilan, Tahun ke XXII No. 257, April, 2007.

Donny Tobing, *Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Perspektif Due Process Of Law*, Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1, November 2017.

Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 15, Yogyakarta, 2008.

Muh Risnain, *Eksistensi Lembaga Quasi Judicial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, FH Unpad, Bandung, 2014.

Nur Ana dan Ditha Wiraputra, *Perbandingan Penanganan Perkara Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Inonesia dan Antitrust Law di Amerika Serikat*, Depok, Jurnal FH UI, 2014.

Rahmat Efendy, *Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*, Jurnal Ilmiah Fitrah, Volume I, 2015.

Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dkk., *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, Jurnal PJIH Vol. 3 Nomor 1, FH Unpad, Bandung, 2016.

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, Yogyakarta, 1997.

Data Elektronik

Asosiasi Pengusaha Tuntut Term of Conduct Kartel, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c517768ed231/asosiasi-pengusaha-tuntut-iterm-of-conducti-kartel> diakses pada 13 April 2018.

Berita, *Kartel SMS Rugikan Konsumen Rp. 2,82 Trilyun, Ini Rinciannya*, <http://bisnis.tempo.co/read/750672/kartel-sms-rugikan-konsumen-rp-282-trilyun-ini-rinciannya>, diakses pada 2 Juni 2018.

<http://www.oft.gov.uk/OFTwork/cartel&competition/cartels/reward>, dalam Rian Mochtar, *Skripsi: Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Inggris*, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 92.

<http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2014/01/Kompetisi> 39 diakses pada 12 April 2018.

<http://www.pengertianahli.com/2015/01/apec-pengertian-tujuan-dan-tentang-sejarah-apec.html>, diakses pada 9 April 2018.

https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm diakses pada 5 Juni 2018.

<https://www.sfo.gov.uk/> diakses pada 23 Juli 2018.

Hukumonline, *Berjuang Mencari Legitimasi Indirect Evidence*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598aba978d57c/berjuang-mencari-legitimasi-indirect-evidence>, diakses pada 26 Juni 2018.

_____, *Hambatan KPPU Membongkar Kartel*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51beb3d585b2c/hambatan-kppu-membongkar-kartel>, diakses pada 3 Juni 2018.

_____, *Hukuman Ganti Rugi Fuel Surcharge Diwarnai Dissenting Opinion*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4be042b2ba06e/hukuman->

ganti-rugi-fuel-surcharge-diwarnai-dissenting-opinion, diakses pada 3 Juni 2018.

_____, *Indirect Evidence Sebagai Alat Bukti Kartel Dipersoalkan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c56cf0541b26/alat-bukti-kartel-dipersoalkan>, diakses pada 16 April 2018.

_____, *KPPU Jalin Kerjasama dengan Polri*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4caf0148f41e4/kppu-jalin-kerjasama-dengan-polri>, diakses 1 Agustus 2018.

_____, *Menggali Karakter Hukum Progresif*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif>, diakses 28 Mei 2018.

_____, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Angka*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598c0069472ea/penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-angka>, diakses pada 4 Juli 2018.

_____, *Status Kelembagaan Masih Menjadi Agenda Utama Komisioner Baru KPPU*, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aec4589128ed/status-kelembagaan-masih-menjadi-agenda-utama-komisioner-baru-kppu>, diakses pada 5 Juni 2018.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf), diakses pada 15 Mei 2018.

Muhammad Idris, *KPPU Tidak Superbody*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3346253/kppu-tidak-superbody>, diakses pada 13 April 2018.

Mula Akmal, *DPR Tanya Dasar Hukum Penyadapan, Ini Jawaban KPK*, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1243179/13/dpr-tanya-dasar-hukum-penyadapan-ini-jawaban-kpk-1506435658>, diakses pada 31 Juli 2018.

Sutrisno Iwantono, *Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel*, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/>, diakses pada 2 Juni 2018.

Wahyudi Djafar, *Penyadapan Intelijen dan Penyadapan di Indonesia: Catatan Ringkas* dalam <https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/10/penyadapan-intelijen-dan-penyadapan-di-indonesia1.pdf> diakses pada 13 Juli 2018.

